

PERAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

Kholifatus Sya'diyah¹⁾, Salsabilla Azzahra Niesma Putri²⁾, Hayat³⁾

123 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2025

Revised Januari 2025

Accepted Januari 2025

Available online Januari 2025

Email:

kholifatus264@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Public administration ethics is essential to achieve transparent governance. This ethic includes integrity, transparency, accountability and justice to combat corruption and nepotism. Applying this ethic fosters an efficient and fair government that prioritizes the interests of society. This article discusses the strategic impact of ethics in improving the quality of public services, public trust, and bureaucratic reform through transparency and participation. It also discusses challenges in implementing ethics, such as corruption and inadequate oversight, and proposes solutions such as ethics education and meritocracy. By promoting strong ethical standards, credible and accountable governance that is aligned with the public interest can be realized.

Keywords: *Accountability, Administrative Ethics, Transparency, Governance*

Abstrak

Etika administrasi publik sangat penting untuk mencapai tata kelola yang transparan. Etika ini mencakup integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk memerangi korupsi dan nepotisme. Menerapkan etika ini menumbuhkan pemerintahan yang efisien dan adil yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. Artikel ini membahas dampak strategis etika dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan reformasi birokrasi melalui transparansi dan partisipasi. Ini juga membahas tantangan dalam penerapan etika, seperti korupsi dan pengawasan yang tidak memadai, dan mengusulkan solusi seperti pendidikan etika dan meritokrasi. Dengan mempromosikan standar etika yang kuat, tata kelola yang kredibel dan akuntabel yang selaras dengan kepentingan publik dapat direalisasikan.

Kata kunci : *Akuntabilitas, Etika Administrasi, Transparansi, Tata Kelola*

PENDAHULUAN

Etika administrasi publik memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi setiap tindakan birokrasi. Dalam konteks ini, etika administrasi publik mencakup seperangkat aturan dan norma yang harus diikuti oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kepentingan masyarakat.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin mengemuka. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat bertindak jujur, adil, dan terbuka dalam semua proses administrasi, sehingga tercipta kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pemerintah. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan etika administrasi publik yang mengutamakan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Tanpa landasan etika yang kuat, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dengan mudah merajalela

dalam pemerintahan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan merusak kredibilitas pemerintah.

Etika administrasi publik memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur negara untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi demi kepentingan umum. Prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme, menjadi faktor penentu dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Selain itu, transparansi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah yang transparan memberikan akses yang jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan, anggaran, dan proses pembuatan keputusan yang diambil. Hal ini tidak hanya meminimalisir terjadinya penyimpangan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Etika administrasi publik mendorong pentingnya akuntabilitas, di mana setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh birokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Secara keseluruhan, peran etika administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan adalah sangat strategis. Dengan adanya etika yang kokoh, tata kelola pemerintahan akan lebih terstruktur, efisien, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam administrasi publik untuk selalu menjaga dan mengedepankan etika dalam setiap tindakannya. Pemerintah yang mengedepankan etika administrasi publik yang baik akan menjadi cermin dari negara yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Penerapan etika administrasi publik menghadapi beberapa tantangan signifikan. Implementasi prinsip-prinsip etika yang tidak konsisten oleh aparatur negara meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar menghambat pembentukan pemerintahan yang bersih. Sistem pengawasan yang tidak memadai memperburuk situasi, tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memerangi perilaku yang tidak etis. Masalah ini diintensifkan oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman nilai-nilai etika di antara pejabat negara, yang berasal dari kurangnya pelatihan etika yang sistematis.

Selain itu, keterbatasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan membatasi upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem e-Government, semakin menghalangi keterbukaan informasi. Terakhir, meritokrasi yang lemah dalam penunjukan pejabat publik menumbuhkan nepotisme, merusak kualitas dan kredibilitas birokrasi. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi perlunya

reformasi komprehensif untuk memperkuat etika administrasi publik dan mencapai tata kelola yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Implementasi terstruktur etika administrasi publik sangat penting untuk mencapai tata kelola yang transparan. Langkah-langkah utama termasuk menyusun kebijakan yang menegakkan prinsip-prinsip etika dengan sanksi ketat untuk pelanggaran. Pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan untuk pejabat diperlukan untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas. Sistem meritokratis harus dibentuk untuk memastikan bahwa pejabat publik ditunjuk berdasarkan kompetensi. Penguatan pengawasan internal dan eksternal melalui instansi seperti Ombudsman dan KPK sangat penting.

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat deteksi pelanggaran. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi dan penganggaran partisipatif sangat penting untuk akuntabilitas. Membina budaya anti-korupsi melibatkan penghargaan integritas dan menegakkan sanksi atas pelanggaran. Sistem whistleblower yang efektif diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas etika administrasi publik dan untuk memfasilitasi perbaikan. Strategi ini bertujuan untuk mendorong tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

PEMBAHASAN

Etika administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan adalah salah satu indikator utama dalam pembangunan negara yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Etika administrasi publik, yang mengatur perilaku aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak hanya mencakup moralitas individu, tetapi juga mencerminkan sistem yang mendukung pencapaian tujuan negara dengan cara yang sah, efisien, dan berkeadilan.

Pengertian Etika Administrasi Publik

Etika administrasi publik dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral dan aturan yang mengatur tindakan dan keputusan para pejabat publik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Etika ini mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks administrasi publik, etika berfungsi untuk memastikan bahwa aparatur negara menjalankan fungsinya dengan cara yang sah, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Prinsip-prinsip Etika Administrasi Publik

Beberapa prinsip dasar dalam etika administrasi publik yang relevan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan antara lain:

- **Integritas:** Aparatur negara harus menjaga kejujuran dan konsistensi dalam bertindak, serta tidak boleh terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme.

- **Transparansi:** Keputusan dan tindakan administratif harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami dasar keputusan yang diambil oleh pemerintah.
- **Akuntabilitas:** Aparatur negara harus dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakan yang diambil, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat.
- **Keadilan:** Setiap tindakan administratif harus didasarkan pada prinsip keadilan, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.
- **Tanggung jawab sosial:** Pejabat publik harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Peran Etika dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) menuntut transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Etika administrasi publik menjadi fondasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten. Berikut adalah beberapa peran etika administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih:

- **Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:** Etika administrasi publik mengharuskan pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Ini penting untuk mencegah korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Sistem etika yang jelas akan membatasi ruang bagi praktik korupsi, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.
- **Menjamin Transparansi dalam Pengambilan Keputusan:** Dengan adanya etika administrasi publik, setiap keputusan yang diambil oleh aparatur negara harus terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat dan pihak berwenang. Transparansi ini mencakup pengungkapan informasi terkait kebijakan publik, penggunaan anggaran, dan proses administratif lainnya, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan.
- **Mendorong Akuntabilitas:** Etika administrasi publik menuntut pejabat publik untuk selalu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas ini akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat umum. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih peduli terhadap dampaknya pada masyarakat.
- **Meningkatkan Keterlibatan Publik:** Etika administrasi publik mengedepankan prinsip partisipasi publik. Pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik dan administratif. Hal ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan serta pengawasan kebijakan publik.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktek Etika Administrasi Publik

Salah satu tantangan terbesar dalam administrasi publik adalah memastikan bahwa praktik etika diterapkan dengan konsisten dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam era digital, keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi menjadi alat yang sangat penting untuk mendukung transparansi. Salah satu contoh yang relevan adalah sistem e-Government, yang memungkinkan proses administratif dilakukan secara online dan dapat diakses oleh publik secara langsung. Selain itu, laporan keuangan pemerintah, hasil audit, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat publik harus dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang terjadi.

Tantangan dalam Penerapan Etika Administrasi Publik

Walaupun etika administrasi publik memainkan peran yang penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, penerapannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama dalam penerapan etika administrasi publik antara lain:

- **Budaya Korupsi:** Di beberapa negara atau instansi, budaya korupsi sudah terintegrasi dalam sistem pemerintahan, sehingga sulit untuk menghilangkannya. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan mengenai etika administrasi bagi pejabat publik, serta pembentukan sistem yang menjamin sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.
- **Kurangnya Sistem Pengawasan yang Efektif:** Meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diatur, tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai, pelaksanaan etika administrasi publik bisa menjadi lemah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Lembaga Anti-Korupsi.
- **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Dalam banyak kasus, masyarakat belum cukup terlibat dalam pengambilan keputusan publik, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas sering kali hanya terjadi pada tingkat formalitas, tanpa adanya kontrol yang signifikan dari masyarakat.

Pentingnya Pendidikan Etika bagi Aparatur Negara

Pendidikan etika administrasi publik adalah langkah awal yang krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pembinaan moral dan pemahaman terhadap nilai-nilai etika harus dilakukan secara berkesinambungan, baik pada tahap perekrutan maupun pengembangan karir aparatur negara. Pemerintah perlu memberikan pelatihan etika yang terstruktur dan sistematis, yang meliputi pemahaman tentang integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, pendidikan etika juga harus dilengkapi dengan praktik nyata yang menggambarkan konsekuensi dari tindakan tidak etis, seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan.

Untuk menciptakan budaya administrasi yang berintegritas, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan etika administrasi dalam setiap proses seleksi dan promosi karir. Misalnya, dalam proses rekrutmen, calon pegawai negeri sipil (PNS) harus melalui seleksi yang

tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga perilaku etis mereka. Hal ini penting agar mereka tidak hanya memiliki keterampilan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang akan membimbing mereka dalam bekerja.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sistem penghargaan bagi pejabat yang menunjukkan integritas dan akuntabilitas tinggi. Penghargaan ini akan mendorong para pegawai negeri untuk berkomitmen pada etika yang tinggi, sekaligus memperlihatkan bahwa nilai-nilai etika dihargai dalam pemerintahan. Sebaliknya, sanksi yang tegas juga harus diterapkan bagi mereka yang melanggar etika dan terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pendidikan etika administrasi publik berfungsi sebagai alat untuk membentuk karakter aparatur negara yang tidak hanya kompeten dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

Membangun Sistem Pengawasan yang Efektif

Penerapan etika administrasi publik yang efektif membutuhkan adanya sistem pengawasan yang kuat. Pengawasan ini harus dilakukan tidak hanya dari dalam pemerintah, tetapi juga oleh lembaga eksternal dan masyarakat. Beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap etika administrasi publik adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga-lembaga independen lainnya yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

Pentingnya pengawasan ini bukan hanya dalam hal pemeriksaan anggaran atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga dalam hal pengawasan terhadap perilaku individu-individu yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga pengawas harus memiliki akses yang cukup untuk mengawasi kebijakan yang diambil, keputusan yang dibuat, dan penggunaan sumber daya publik, serta mendeteksi segala bentuk potensi penyalahgunaan wewenang.

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sistem e-Government, misalnya, dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan publik dan pengelolaan anggaran negara. Platform pengaduan publik yang berbasis teknologi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses pengawasan dan mengurangi potensi intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, perlu adanya evaluasi yang berkesinambungan terhadap implementasi kebijakan, guna memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan selalu berada dalam jalur yang benar. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas administratif, serta untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan baik.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Partisipasi Publik

Masyarakat memegang peranan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi publik yang aktif adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah tetap sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu cara agar masyarakat dapat berpartisipasi adalah dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi yang relevan mengenai kebijakan publik.

Pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Proses konsultasi publik yang terbuka, di mana masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang sedang dibahas, adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berkeadilan dan transparan. Selain itu, partisipasi publik juga dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, sehingga mereka lebih peduli untuk mengawasi pelaksanaannya.

Salah satu contoh dari partisipasi publik yang efektif adalah pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran daerah. Melalui mekanisme partisipatif ini, masyarakat dapat memberikan usulan mengenai prioritas penggunaan anggaran, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, mekanisme partisipasi ini juga dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan anggaran dan mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi selama proses alokasi dana.

Peran media massa juga sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Media yang independen dan bebas dapat bertindak sebagai "watchdog" bagi pemerintah, dengan melakukan investigasi terhadap kebijakan atau tindakan yang merugikan masyarakat. Melalui laporan-laporan investigatif, media dapat membantu mengungkapkan praktik-praktik yang tidak etis dan mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Reformasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan adalah peningkatan kualitas layanan publik. Aparatur negara harus dapat memberikan layanan yang cepat, efisien, dan bebas dari praktik pungli atau gratifikasi. Etika administrasi publik mengajarkan bahwa setiap individu yang berinteraksi dengan pemerintah, baik itu masyarakat atau sektor swasta, harus diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan optimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain itu, reformasi ini juga mencakup perbaikan dalam sistem manajemen SDM di sektor publik, dengan memperkenalkan sistem meritokrasi yang dapat menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki kompetensi yang akan menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Kesimpulan Akhir

Secara keseluruhan, etika administrasi publik memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika yang mendalam, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas, pemerintah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, seperti budaya korupsi dan pengawasan yang lemah, berbagai langkah dapat diambil untuk memperkuat implementasi etika administrasi, termasuk pendidikan etika yang berkesinambungan, penguatan lembaga pengawas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Pada akhirnya, etika administrasi publik bukan hanya tentang bagaimana pejabat publik bertindak, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya secara keseluruhan, memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan publik dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang tinggi.

Strategi Penguatan Etika dalam Administrasi Publik

Untuk menguatkan etika dalam administrasi publik dan memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sejumlah strategi dapat diimplementasikan secara sistematis. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

a. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Etika

Penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada prinsip etika merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara, laporan aset pejabat publik, serta pembatasan gratifikasi, harus menjadi prioritas. Selain itu, regulasi yang mewajibkan adanya laporan tahunan mengenai kinerja instansi pemerintah dan pengelolaan anggaran akan mendorong budaya transparansi. Pemerintah juga perlu memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat mengenai pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik, serta menegakkan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggaran etika administrasi.

b. Penggunaan Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi

Di era digital, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi administrasi publik. Penggunaan e-Government dan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan publik mengakses data pemerintahan akan membantu mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Misalnya, platform e-budgeting yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi anggaran pemerintah dapat membantu mengawasi aliran dana publik. Selain itu, sistem pengaduan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memantau kinerja pemerintah.

c. Penerapan Sistem Meritokrasi dalam Birokrasi

Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi adalah langkah yang sangat penting untuk menghindari nepotisme dan korupsi dalam pengangkatan jabatan. Pegawai yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan prestasi, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau politik. Sistem meritokrasi memastikan bahwa setiap

pegawai publik memiliki peluang yang sama untuk maju berdasarkan kemampuannya, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pemerintahan. Dalam sistem ini, etika administrasi juga dilihat sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri.

d. Pembangunan Budaya Anti-Korupsi dalam Institusi Pemerintah

Korupsi merupakan salah satu musuh terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi pemerintah untuk membangun budaya anti-korupsi yang kuat. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan anti-korupsi secara teratur kepada seluruh aparat pemerintah, mulai dari pejabat tinggi hingga pegawai yang berada di level dasar. Selain itu, penting untuk membentuk unit atau satuan tugas yang khusus menangani kasus korupsi dalam institusi pemerintah. Dengan membudayakan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan pemerintahan, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.

e. Sistem Pelaporan dan Whistleblowing

Sistem pelaporan atau whistleblowing adalah mekanisme yang memungkinkan individu melaporkan adanya tindakan tidak etis atau pelanggaran hukum yang terjadi di dalam pemerintahan. Sistem ini harus dijamin kerahasiaannya untuk melindungi pelapor dari potensi ancaman atau tekanan. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka memberikan perlindungan yang cukup bagi whistleblower agar mereka merasa aman untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang terjadi dalam organisasi pemerintah. Hal ini juga akan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara.

Peran etika administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sangatlah fundamental. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika yang mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial, pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapannya perlu dihadapi dengan reformasi sistemik, penguatan lembaga pengawas, serta pendidikan etika yang berkesinambungan bagi aparat negara. Jika hal ini dapat tercapai, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan akan semakin mendekati kenyataan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peran etika administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sangatlah fundamental. Etika administrasi publik tidak hanya sekadar pedoman moral bagi aparat negara, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang berintegritas, efisien, dan akuntabel. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas memainkan peran vital dalam menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seringkali merusak citra pemerintah dan menghambat pembangunan. Dengan menanamkan nilai-nilai etika yang kuat, aparat negara diharapkan mampu bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang



bersih, di mana setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan masyarakat pun dapat ikut serta dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan etika administrasi publik yang baik tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan etika yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas-tugas administrasi, pemerintahan yang bersih dan transparan dapat tercapai, menciptakan suasana pemerintahan yang lebih kredibel, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

REFERENSI

- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 259-268.
- Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500-512.
- Adam, Y., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(7), 856-865.
- Dewata, M. F. N. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15-30.
- SITANGGANG, R. (2022). Kedudukan Serta Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Hukum Di Indonesia.
- Albab, U., Kurniawan, D., Yuniarti, Y., Yuliana, N. A., & Dewi, C. K. (2024). Sosialisasi Peran Penting Masyarakat dalam Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Anti Korupsi Melalui Kesadaran Kolektif di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(4), 67-75.